



TANGGAPAN, MASUKAN, DAN PERTANYAAN
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA DPR RI
DALAM RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI IV DPR RI DENGAN
PEJABAT ESELON I KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN RI SERTA KEPALA BADAN RESTORASI GAMBUT DAN
MANGROVE
RABU, 6 APRIL 2022

Agenda : **Membahas tindak lanjut Rapat Kerja tanggal 28 Maret 2022 dan lain-lain.**

Disampaikan oleh : **DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc.**

No Anggota : **A-84**

Assalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Shalom

Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan,

Salam Indonesia Raya

Yang Terhormat,

- 1. Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI;**
- 2. Bapak Sekjen KLHK dan seluruh Pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI beserta jajaran;**
- 3. Bapak Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove beserta jajaran.**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menjalankan aktifitas sehari-hari dengan baik. Aamiin ya rabbal alamin.

Sehubungan dengan pembahasan materi Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan serta Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyampaikan beberapa catatan, tanggapan, masukan dan pertanyaan sebagai berikut;

1. BRGM telah membuat proyeksi kehilangan mangrove pada tahun 2024 dan 2030, dengan skenario net deforestasi tahun 2024 seluas 51.273 hektar dan tahun 2030 seluas 128.180 hektar. Sedangkan skenario gross deforestasi 2024 akan terjadi kehilangan mangrove seluas 104.456 hektar dan tahun 2030 seluas 261.140 ha. Penyebab kehilangan mangrove diantaranya: eksploitasi mangrove yang berlebihan, konversi mangrove menjadi lahan pertanian, tambak dan kebun kelapa sawit. Selain upaya rehabilitasi mangrove yang sedang digalakkan, Fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan BRGM dan KLHK terkait upaya perlindungan dan pengaturan seperti apa yang akan dilakukan sehingga potensi kehilangan mangrove tersebut dapat dihindari.
2. Secara nasional terdapat sebanyak 1.187 unit IPPKH dengan kewajiban Rehabilitasi DAS seluas 558.003,20 hektar. Dari 1.187 unit IPPKH telah ditetapkan sebanyak 708 unit IPPKH (60%) dengan luas 443.182,98 hektar (79%), dan yang belum ditetapkan sebanyak 478 unit IPPKH (40%) seluas 159.644,54 hektar (29%). Fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan KLHK kenapa 478 unit IPPKH tersebut belum ditetapkan dan apa kendala yang dihadapi.
3. Fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan terkait bentuk kegiatan yang dilakukan pada adaptasi perubahan iklim dengan output Program Kampung Iklim (Proklim), dimana target tahun 2022 sebanyak 200 kelompok masyarakat dan tahun 2023 sebanyak 290 kelompok masyarakat. Selain itu, yang menjadi target akhir apakah terbentuknya Kampung Iklim atau tersosialisasinya Program Kampung Iklim? Jika yang ingin dicapai adalah Kampung Iklim, berapa target Kampung Iklim yang ingin dicapai, mengingat salah satu persyaratan Program Kampung Iklim adalah sudah ada kegiatan adaptasi perubahan iklim di kampung tersebut sekurang-kurangnya 2 tahun. Selain itu, apakah bisa berkolaborasi dengan Desa Peduli Gambut di wilayah yang kebetulan beririsan, mengingat gambut adalah salah satu emiter Gas Rumah Kaca (GRK).
4. Fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan bentuk kegiatan pada bantuan UMKM Kehutanan untuk SVLK dengan alokasi anggaran Rp 25,38 Milyar. Mengingat selain untuk sertifikasi dan/atau penilaian, UMKM Kehutanan juga membutuhkan

dukungan untuk biaya Diklat Tenaga Teknis (GANISPHPL) Penguji Kayu Bulat/Gergajian. Selain itu, agar dapat dipastikan dukungan ini dapat meningkatkan pendapatan kelompok UMKM melalui ekspor produk-produk UMKM.

5. Fraksi Partai Gerindra meminta agar penanganan konflik antara satwa liar dengan manusia ditingkatkan. Demikian pula dengan penanganan perburuan satwaliar dilindungi yang disinyalir makin meningkat sejak pandemi Covid 19. Baik mulai dari pengawasan, patroli rutin, hingga sosialisasi kepada masyarakat. Termasuk jumlah personil dilapangan dan kesejahteraan mereka dalam melaksanakan tugas.
6. Fraksi Partai Gerindra meminta kepada KLHK untuk mengadakan program pendampingan terhadap masyarakat terkait pengolahan limbah dan program bang sampah di setiap Kota/Kabupaten yang belum ada alat pengolahan limbah. Dan dapat ditingkatkan pada tahun 2023.
7. Fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan terkait penanganan konflik tenurial di lokasi IKN, mengingat saat kunjungan kerja yang lalu masih ada yang mengklaim bahwa ada Hutan Lindung yg digunakan untuk IKN.
8. Saat ini kepedulian masyarakat terhadap kawasan mangrove harus terus ditingkatkan. Upaya rehabilitasi dan konservasi hanya akan berlanjut dengan adanya kerjasama dan partisipasi masyarakat. Oleh karenanya Fraksi Partai Gerindra meminta perlu ada edukasi mengenai potensi kawasan hutan mangrove sebagai tujuan wisata agar dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat dan melalui program bimbingan teknis diharapkan masyarakat semakin teredukasi dan berpartisipasi.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI;

Bapak Sekjen KLHK, dan seluruh Pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI beserta jajaran;

Bapak Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove beserta jajaran.

Demikian tanggapan, catatan, masukan, dan pertanyaan Fraksi Partai Gerindra dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI serta Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Indonesia Raya.

KOMISI IV FRAKSI PARTAI GERINDRA DPR RI

G. Budisatrio Djiwandono	- Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
Ir. KRTH. Darori Wonodipuro, M.M., IPU	- Kapoksi
DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc.	- Anggota
Ir. H. TA Khalid, M.M.	- Anggota
DR. H. Azikin Solthan, M.Si.	- Anggota
Ir. Dwita Ria Gunadi	- Anggota
Ir. Endro Hermono, M.B.A	- Anggota